

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 71 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam rangka mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD sebagaimana

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 16, disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan kata lain, LPPD merupakan gambaran kinerja tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD), dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya untuk menyampaikan LPPD Kota Bandung Tahun 2018 kepada Pemerintah melalui Gubernur. Dengan demikian, LPPD ini merupakan laporan kinerja pelaksanaan RKPD Kota Bandung Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 978 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2018, yang merupakan penjabaran tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025.

#### **A. Dasar Hukum Pembentukan Daerah**

Kota Bandung sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara) pada tanggal 15 Agustus 1950, Kota Besar Bandung terbentuk. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, maka sebutan Kota Besar diganti dengan istilah "Kota Praja Bandung". Kemudian,

melalui Surat Edaran Walikota Kepala Daerah Bandung Nomor 637 tanggal 19 Maret 1966, maka Kota Praja Bandung diubah menjadi Kotamadya Bandung dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang kemudian berubah kembali menjadi Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2000 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur dan Titelatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang berlaku hingga sekarang.

## **B. Gambaran Umum Daerah**

Kota Bandung terletak di antara 107° 36' Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan, dengan keadaan geologis dan tanah terdiri atas lapisan aluviall hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis aluviall kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol.

Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya, namun pada beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan suhu yang disebabkan antara lain oleh polusi dan meningkatnya suhu global (*global warming*).

## **C. Kondisi Geografis Daerah**

### **a. Batas Administrasi Daerah**

Kota Bandung secara administratif berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung;
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Dengan posisi yang dimilikinya, maka Kota Bandung berada pada lokasi yang cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi dan potensi perekonomian. Hal tersebut disebabkan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu :

- 1) Barat – Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
- 2) Utara – Selatan, selain menjadi penghubung utama Ibukota Negara dengan wilayah Selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan dan perikanan.

### **b. Luas Wilayah**

Luas wilayah Kota Bandung 16.729,65 Ha. Luas tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Luas tersebut merupakan perubahan terakhir dari luasan sebelumnya, yaitu 1.922 Ha (tahun 1906 – 1917), 2.871 Ha (tahun 1917 – 1942), 5.413 Ha (tahun 1942 – 1940), dan 8.098 Ha (tahun 1949 – 1987). Luas keseluruhan Kota Bandung 16.729,65 Ha yang terbagi dalam wilayah administratif 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1.584 Rukun Warga (RW), dan 9.873 Rukun Tetangga (RT).

### **c. Kondisi Topografis**

Topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 Meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675

Meter dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan sampai jalur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit.

**Tabel I-1**

**Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Kota Bandung Menurut Kecamatan Tahun 2018**

<b>No.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH BANGUNAN RUMAH*)</b>
1.	Sukasari	12.714
2.	Sukajadi	18.656
3.	Cicendo	15.569
4.	Andir	19.376
5.	Cidadap	6.506
6.	Coblong	12.008
7.	Bandung Wetan	6.294
8.	Sumur Bandung	9.040
9.	Cibeunying Kaler	9.902
10.	Cibeunying Kidul	16.201
11.	Kiaracondong	19.913
12.	Batununggal	16.365
13.	Lengkong	13.583
14.	Regol	13.780
15.	Astana Anyar	32.131
16.	Bojongloa Kaler	27.137
17.	Babakan Ciparay	26.227
18.	Bojongloa Kidul	21.573
19.	Bandung Kulon	23.221
20.	Antapani	10.089
21.	Arcamanik	10.989
22.	Ujungberung	10.070
23.	Cibiru	11.631
24.	Rancasari	13.333
25.	Buahbatu	15.933
26.	Bandung Kidul	7.477
27.	Gedebage	7.966
28.	Panyileukan	7.453
29.	Cinambo	2.936
30.	Mandalajati	9.744

No.	KECAMATAN	JUMLAH BANGUNAN RUMAH*)
	JUMLAH	426.634

Sumber : Dinas Penataan Ruang

#### D. Gambaran Umum Demografis, Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin, Struktur Usia, Jenis Pekerjaan dan Pendidikan

Jumlah penduduk Kota Bandung per Desember 2018 adalah sebanyak 2.452.179 jiwa, dengan rincian kondisi penduduk dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel I-2**  
**Struktur Penduduk Kota Bandung**  
**Menurut Struktur Usia, Angkatan Kerja dan Pendidikan**  
**Tahun 2018**

No.	Uraian	2018		
1.	Jumlah Penduduk	2.452.179		
2.	Komposisi Penduduk , menurut :			
	a Jenis Kelamin			
	- Pria	1.233.357		
	- Wanita	1.218.822		
	b Struktur Usia	Pria	Wanita	Jumlah
	- >75	26.505	31.489	57.994
	- 70 – 74	39.373	36.481	72.854
	- 65 – 69	33.645	33.371	67.016
	- 60 – 64	49.918	52.001	101.919
	- 55 – 59	61.196	64.808	126.004
	- 50 – 54	77.290	78.962	156.252
	- 45 – 49	88.648	88.800	177.448
	- 40 – 44	98.609	97.615	196.224
	- 35 – 39	106.286	103.339	209.625
	- 30 – 34	91.973	89.990	181.963
	- 25 – 29	94.173	94.297	188.470
	- 20 – 24	92.677	91.229	183.906
	- 15 – 19	101.321	96.169	197.490
	- 10 – 14	107.951	102.016	209.967
	- 5 – 9	109.488	102.619	212.107
	- 0 – 4	71.237	66.346	137.583

c	Angkatan Kerja	
	- Jumlah Tenaga Kerja	1.107.986
	- Jumlah Pengangguran	96.465
d	Pendidikan (penduduk usia >10 th & ijazah tertinggi)	
	- Tidak/belum pernah sekolah	410.397
	- Tidak/belum tamat SD	246.947
	- SD/MI	309.753
	- SLTP/MTs/Sederajat	332.448
	- SLTA/Sederajat	770.464
	- SMK/Sederajat	-
	- D1/D2	21.994
	- D3	91.755
	- D4/S1	238.036
	- S2/S3	30.385

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel I-3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Kota Bandung Tahun 2018**

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Laki Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
SUKASARI	38,124	38,132	76,256
COBLONG	56,486	55,851	112,337
BABAKAN CIPARAY	69,904	67,173	137,077
BOJONGLOA KALER	62,488	60,439	122,927
ANDIR	49,546	49,244	98,790
CICENDO	47,844	47,154	94,998
SUKAJADI	50,541	50,243	100,784
CIDADAP	26,907	26,104	53,011
BANDUNG WETAN	14,361	14,432	28,793
ASTANA ANYAR	36,882	36,814	73,696
REGOL	39,748	39,722	79,470
BATUNUNGGAL	60,182	59,777	119,959
LENGKONG	34,950	35,554	70,504
CIBEUNYING KIDUL	55,781	55,359	111,140
BANDUNG KULON	66,596	65,246	131,842
KIARACONDONG	64,445	64,129	128,574
BOJONGLOA KIDUL	43,074	41,762	84,836
CIBEUNYING KALER	34,463	34,614	69,077
SUMUR BANDUNG	18,229	18,004	36,233
ANTAPANI	38,755	38,735	77,490
BANDUNG KIDUL	29,483	29,484	58,967
BUAH BATU	49,816	49,645	99,461
RANCASARI	40,847	41,182	82,029
ARCAMANIK	37,549	37,231	74,780
CIBIRU	36,661	35,349	72,010
UJUNGBERUNG	42,500	42,052	84,552
GEDEBAGE	20,017	19,623	39,640
PANYILEUKAN	19,477	19,156	38,633
CINAMBO	12,654	12,158	24,812
MANDALAJATI	35,047	34,454	69,501

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Tabel I-4**  
**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kota**  
**Tahun 2018**

NO	KOTA	JUMLAH KEPALA KELUARGA*)
1.	Bandung	747.923

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **E. Kondisi Ekonomi Kota Bandung**

### **a. Potensi Unggulan Daerah**

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi Unggulan Daerah di Kota Bandung diilustrasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan pola konsumsi dan kemampuan atau kapasitas lapangan usaha dalam periode tahun berjalan, yang dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai PDRB. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Kontribusi sektor PDRB terhadap Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I-5****PDRB Per Sektor Kota Bandung Tahun 2017**

NO.	Sektor	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)
		2017**	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	188.927,66	286.222,02
2	Industri Pengolahan	34.753.930,16	46.404.982,69
3	Pengadaan Listrik dan Gas	165.363,98	237.643,91
4	Bangunan/Kontruksi	15.238.956,14	21.275.805,33
5	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	49.410.000,07	63.777.426,91
6	Informasi dan Komunikasi	21.245.090,37	24.270.353,06
7	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.994.224,74	14.145.708,63
8	Jasa-jasa	6.006.950,49	8.654.962,31
	<b>TOTAL</b>	<b>135.003.440</b>	<b>179.053.101</b>

**Keterangan :** Sumber Data PDRB Tahun 2018 Kota Bandung dari Badan Pusat Statistik dan akan diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2019

**Tabel I-6****Pertumbuhan PDRB Kota Bandung Tahun 2014, 2015,2016,2017,2018**

TAHUN	PDRB Perkapita	
	Harga Berlaku*)	Harga Konstan*)
2014	172.697.869	138.960.941
2015	195.774.385	149.580.379
2016	216.863.640	161.227.832
2017	240.109.627	172.851.960
2018	0	0

**Keterangan :** Sumber Data PDRB Tahun 2018 Kota Bandung dari Badan Pusat Statistik dan akan diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2018

**b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

Perkembangan pembangunan ekonomi yang sangat pesat menurut menuntut adanya pemantauan dan evaluasi

perekonomian makro secara berkala. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dapat diketahui dengan membandingkan perubahan indikator pokok angka-angka dan indeks-indeks pembentuk/komposit besaran yang menjadi dasar penetapan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel I-7**  
**Indikator Makro dan Indeks Komposit**  
**Kota Bandung Tahun 2017**

Indikator	Satuan	2017**
IPM	Point	80.31
Angka Harapan Hidup (AHH)	%	73.86
Angka Melek Huruf (AMH)	%	
Standar Hidup Layak Konsumsi per Kapita yang disesuaikan		
Indeks Daya Beli	Point	
Indeks Pendidikan	Point	67.56
Indeks Kesehatan	Point	75.22
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10.59
LPE (Konstan)	%	7.21
PDRB (Berlaku)	Juta Rupiah	240.109.627
PDRB (Konstan)	Juta Rupiah	172.851.960
PDRB per Kapita (Berlaku)	Rupiah	10.77
PDRB per kapita (Konstan)	Rupiah	96.12
Jumlah Investasi	Rupiah	10.623.242.413.023
Inflasi	%	3.46
<b>Keterangan :</b> Sumber Data PDRB Tahun 2018 Kota Bandung dari Badan Pusat Statistik dan akan diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2019		

Untuk Inflasi Kota Bandung berdasarkan paparan Ekonomi Makro Kota Bandung per Desember 2017 sebesar 2,93%. Pada tahun 2017 nilai inflasi Kota Bandung per Desember sebesar 3,46%, sehingga terjadi kenaikan inflasi sebesar 0,53 %. Hal ini di pacu oleh kenaikan harga bahan pokok terutama beras. Kenaikan harga beras di Kota Bandung paling tinggi di Jawa Barat dan berada diatas ambang batas norma sebesar 18%.